

**UPAYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG
INFRASTRUKTUR DALAM PENUNJANG KEBUTUHAN
MASYARAKAT DESA DI ORO-ORO OMBO KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik



OLEH:

ADERISKI PADA BOLI YORA

2018210003

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan lembaga lingkungan hidup setempat secara partisipatif, Pemerintah Daerah mendorong kegiatan ramah lingkungan yang dikenal dengan Rencana Perbaikan Kota. Di Kota Oro Ombo, Kota Batu, penelitian ini diharapkan dapat menentukan variabel-variabel yang memberdayakan dan menghambat perencanaan pembangunan dan perbaikan pondasi. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam desain penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Oro Oro Ombo selama ini berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang terus berjalan dan tepat sasaran, antara lain pembangunan gedung serbaguna, penyediaan air minum, dan infrastruktur jalan. dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Kata Kunci: Perencanaan; Pembangunan; Infrastruktur; Masyarakat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dan penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Berdasarkan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan 4 Tahun 2006 tentang Strategi Penyusunan Rancangan Perbaikan Publik bahwa kerangka penyusunan perbaikan merupakan suatu siklus yang mengingat 5 metodologi untuk keseluruhan rantai penataan, khususnya politik, top-down dan bottom-up, partisipatif, teknokratis.

Laporan tahunan disusun oleh Rencana Perbaikan Tahunan Daerah, juga dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disebut sebagai RPJPD, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, karena merupakan perpanjangan dari RPJMD, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kerangka awal ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pembiayaan semuanya termasuk dalam RPJPD. Masyarakat dan pemerintah setempat tidak dapat mendukung inisiatif ini. RKPD disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: pembahasan draf rencana kerja, draf akhir RKPD, dan rencana pengembangan.

Untuk situasi ini draft dasar RKPD akan disiapkan oleh Kepala Bappeda. Kepala SKPD selanjutnya akan membuat Rencana Kerja (Renja) berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan menggunakan draf awal RKPD. Rencana Kerja Renja menjabarkan kebijakan umum SKPD serta program dan kegiatan pembangunan di lingkungan SKPD, termasuk yang dilakukan oleh SKPD dan dengan penggerak partisipasi masyarakat. Berdasarkan Rencana Kerja SKPD, RKPD dibuat dan menjadi dasar pembahasan rencana pembangunan daerah. RKPD versi final dibuat dengan menggunakan hasil musrenbang. Penyusunan RAPBD kemudian berpedoman pada rancangan tersebut dalam peraturan kepala daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Menurut Pasal 114 Pedoman Pembangunan Desa Tahun 2014, “Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. cara dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan”. Untuk mencapai pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial, Pembangunan Partisipatif merupakan sistem manajemen pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa.

Unit pemerintahan terendah dalam pemerintahan daerah adalah desa atau kelurahan yang meliputi kota, kabupaten, dan provinsi. Daerah pedesaan Indonesia, tempat tinggal mayoritas penduduk, sangat penting bagi pertumbuhan dan stabilitas negara. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu cara pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terencana, dan hemat biaya.

Istilah "perencanaan" mengacu pada proses memilih tindakan terbaik untuk masa depan dari serangkaian opsi sambil mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah demikian. Setelah itu, UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan demikian.

Perekonomian suatu negara tidak dapat berfungsi dengan baik jika infrastrukturnya tidak memadai. Biaya yang dianggap berlebihan dapat berdampak pada bisnis dan organisasi yang kurang memiliki daya saing akibat dari pengeluaran tersebut. Bisa juga salah satunya ketika terjadi pengkhianatan sosial, misalnya. Wajar jika sebagian warga kesulitan mengunjungi fasilitas kesehatan atau menyekolahkan anaknya karena biaya dan sulitnya perjalanan.

Investasi pada infrastruktur fisik Indonesia dengan kualitas di bawah standar juga dapat menimbulkan masalah yang lebih serius. Tak bisa dipungkiri, kondisi geografis Indonesia juga harus diperhatikan oleh investor. Selain berada di cincin api Pasifik, wilayah Indonesia berada di kawasan yang banyak menerima curah hujan dari badai tropis karena letaknya di garis khatulistiwa. Indonesia sangat

rentan terhadap bencana alam dan mudah dimasuki, Mengakibatkan salah satu gangguan yang paling signifikan terhadap arus barang dan jasa.

Industri kreatif Indonesia didukung oleh infrastruktur negara. Pengembangan sumber daya manusia yang terlibat sangat penting untuk membantu terciptanya ekosistem yang efisien bagi industri kreatif. karena dengan begitu tujuan negara Indonesia untuk membuat negara lebih maju secara ekonomi dapat terwujud. Anda berkesempatan untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini dan membantu memperbaiki infrastruktur Indonesia. Anda juga bisa dikatakan berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia dengan cara ini.

Pengenalan BUMDes sebagai entitas ekonomi baru dan unit usahanya, termasuk unit usaha transit wisata, secara tidak langsung akan memperkenalkan nilai-nilai baru yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di pedesaan. Dengan memudahkan wisatawan untuk berkeliling, pengelolaan masyarakat setempat akan membantu masyarakat dalam menumbuhkan modal sosialnya. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Desa harus menyusun rencana kegiatan pembangunan yang memanfaatkan seluruh sumber daya berdasarkan kebutuhannya sendiri. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa selama ini terabaikan karena banyaknya program pembangunan. Akibatnya, keberdayaan masyarakat dan kesadaran akan proses dapat menurun akibat kurangnya pemahaman antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan perencanaan pembangunan pada bidang infrastruktur diatas maka dalam proposal skripsi ini penulis bermaksud untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu dengan judul: “Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Penunjang Kebutuhan Kesejahteraan Masyarakat”.

1.1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu indikator yang ditentukan agar dapat menjawab persoalan yang telah mencedai permasalahan pada latar belakang yang telah dibahas. Maka berikut adalah rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu;

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk melakukan rencana pembangunan dalam penunjang kebutuhan masyarakat?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat perencanaan pembangunan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu?

1.2. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perencanaan pengembangan pada bidang infrastruktur di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa sosiologi khususnya dan pembaca yang lain.
 - 2) Sebagai bahan masukan bagi para peneliti lain yang akan melakukan kajian sejenis.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan wawasan pengetahuan terhadap teori-teori dan praktek mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pengembangan

2) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan menyangkut program-program pembangunan.

3) Bagi Masyarakat

Dapat menjadi point kesadaran serta dapat berperan dan bekerjasama dalam perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dewi, Karyaningsih, Dra. RR. Ponco. *Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rudy. 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Pemerintah Masyarakat*. Malang: Setara Press.

JURNAL/INTERNET

- Ardilah, Tifani. Mochamad Makmur. Imam Hanafi. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 71-77.
- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi, Skematika dan Terapan*. Penerbit, Bumi Aksara. Hal 207.
- Lubis, Asri. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. *Jurnal: Tabularasa Pps Unimed Vol.6 No.2*, Desember 2009.
- Malo, Alpianus. Firman Firdausi. *Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019) 53 [Www.Publikasi.Unitri.Ac.Id](http://www.Publikasi.Unitri.Ac.Id).
- Dekki Umamur Ra'is, Dody Setyawan, dan Yordanus Dimus. *Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu*. *Reformasi* DOI: 10.33366/rfr.v%vi%i.1910 ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 10 Nomor 2 (2020) 228 <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>.

Saiba Kuniyo, Dewi Citra Larasati. *Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Fisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Issn. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019) 114 [Www.Publikasi.Unitri.Ac.Id](http://www.Publikasi.Unitri.Ac.Id)

Suprojo, Agung dan Budi Siswanto. *Pembangunan Kota Wisata Batu Dalam Perspektif Sosial & Ekonomi Masyarakat (Suatu Kajian Perspektif Perubahan Sosial & Ekonomi*. Reformasi ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Vol. 7 No. 1 (2017) 78

Vega Virjina Orangbio, Jantje Tinangon, Natalia Gerungai. *Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 53-60 53.

<https://money.kompas.com/read/2021/03/21/094946626/arti-infrastruktur-pengertian-jenis-fungsi-dan-contohnya>

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/126711244/bab3.pdf>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden. No 72/2005 Pasal 57, Bahwa Masyarakat Berhak Memberikan Masukan Secara Lisan Atau Tertulis Dalam Rangka Penyiapan Atau Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

